

A

HAMBATAN-HAMBATAN PENYERAHAN URUSAN DAERAH

(Studi Kasus : Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat II Surabaya)

SKRIPSI

198
Fa.P. ^{kr} 175/98
Bas
h.



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

ARIS BASUKI

NIM : 079314017

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

**HAMBATAN-HAMBATAN
PENYERAHAN URUSAN DAERAH**
(Studi Kasus : Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat II Surabaya)

S K R I P S I

**Sebagai Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Oleh :

ARIS BASUKI

NIM : 079314017

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

HAMBATAN-HAMBATAN PENYERAHAN URUSAN DAERAH

(Studi Kasus: Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

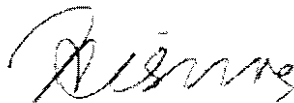
ARIS BASUKI

NIM. 079314017

Telah Disetujui Untuk Diujikan

Tanggal: 3 Juli 1998

DOSEN PEMBIMBING



Drs. WISNU PRAMUTANTO Pk.

NIP. 131 453 124

HAMBATAN-HAMBATAN PENYERAHAN URUSAN DAERAH

(Studi Kasus: Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Surabaya)

SKRIPSI

Dipresentasikan Oleh:

ARIS BASUKI

NIM. 079314017

Dinyatakan LULUS Evaluasi Presentasi

Tanggal: 23 Juli 1998

Tim Penguji

1. Drs. Sutrisno, MS.

NIP. 130 937 951

Ketua

2. Drs. Wisnu Pramutanto Pk.

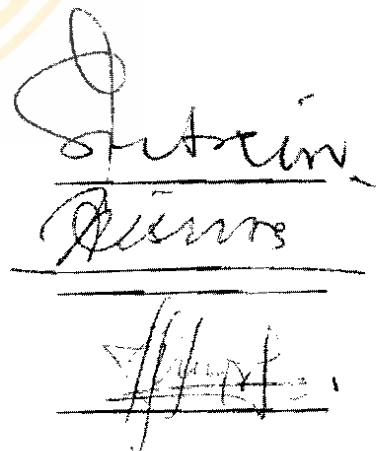
NIP. 131 453 124

Anggota

3. Dra. Dwi Windyastuti B.H, MA

NIP. 131 801 643

Anggota



ABSTRAKSI

Tema yang diangkat dalam Skripsi ini adalah masalah Otonomi Daerah, khususnya pada hambatan-hambatan Penyerahan Urusan Daerah. Urusan yang dikaji yaitu masalah penyerahan urusan lalu lintas dan angkutan jalan Pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Adanya penyerahan urusan pada daerah akan menjadikan daerah tersebut semakin otonom, karena semakin banyak urusan yang menjadi urusan rumah tangga sendiri. Dengan semakin banyak urusan yang diserahkan pada pemerintah daerah tingkat II, maka akan semakin banyak pula dibentuk dinas-dinas daerah.

Untuk menangani urusan lalu-lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga sendiri Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah membentuk Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah. Terbentuknya Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bukan merupakan hasil dari penyerahan urusan tetapi merupakan perluasan, pemekaran atau peningkatan dari urusan pangkal yang sudah diserahkan. Urusan ini sudah ditangani oleh bagian ekonomi dan sekarang sudah diserahkan pada Dinas LLAJ untuk menjadi kewenangannya.

Jadi secara teoritik penyerahan urusan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak mencerminkan otonomi yang nyata, tetapi penyerahan urusan tersebut hanya perluasan, pemekaran atau peningkatan dari urusan yang telah diserahkan sebelumnya, bukan pemberian otonomi secara nyata.

Berdasarkan data yang didapat, maka dalam penyerahan urusan lalu lintas dan angkutan jalan masih ditemukan beberapa kendala, yaitu bahwa dalam penyerahan urusan pemerintah daerah tingkat I masih enggan untuk melepaskan aset ekonominya. Hal ini didasari oleh kekhawatiran hilangnya sumber-sumber pendapatan. Kendala lainnya yaitu terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, prasarana yang terbatas, dan dicabutnya beberapa sumber pendapatan Dinas.

Selain itu dalam pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, karena urusan-urusan yang seharusnya ditangani masih ditangani oleh unsur pemerintah daerah yang lain, yaitu Dinas Pekerjaan Umum.